



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

- Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 17);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.804.878.086.045,16 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 59.459.307.951,00 sehingga menjadi Rp. 1.864.337.393.996,16 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.804.878.086.045,16	
b. Bertambah	Rp	<u>59.459.307.951,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.864.337.393.996,16
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.890.938.986.701,39	
b. Bertambah	Rp	<u>173.227.521.976,65</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp <u>2.064.166.508.678,04</u>
Defisit setelah Perubahan			Rp (199.829.114.681,88)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula

Rp 86.060.900.656,23

2). Bertambah

Rp 113.768.214.025,65

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp 199.829.114.681,88

b. Pengeluaran

1). Semula

Rp 0,00

2). Bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp 199.829.114.681,88

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan

Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula

Rp 177.247.641.729,16

2). Bertambah

Rp 21.873.017.572,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp 199.120.659.301,16

b. Dana Perimbangan

1). Semula

Rp 1.172.450.150.726,00

2). Berkurang

Rp (13.225.817.663,00)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan

Rp 1.159.224.333.063,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1). Semula

Rp 455.180.293.590,00

2). Bertambah

Rp 50.812.108.042,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan

Rp 505.992.401.632,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp	39.644.700.000,00		
2). Bertambah	Rp	<u>3.960.000.000,00</u>		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp	43.604.700.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp	12.583.073.443,00		
2). Bertambah	Rp	<u>908.652.030,00</u>		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp	13.491.725.473,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp	1.381.521.328,16		
2). Berkurang	Rp	<u>(47.500.000,00)</u>		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	1.334.021.328,16

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1). Semula	Rp	123.638.346.958,00		
2). Bertambah	Rp	<u>17.051.865.542,00</u>		
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp	140.690.212.500,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1). Semula	Rp	113.012.775.726,00		
2). Berkurang	Rp	<u>(36.301.147.663,00)</u>		
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp	76.711.628.063,00

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula	Rp	993.319.105.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp	993.319.105.000,00

c. Dana Alokasi Khusus			
1). Semula	Rp	66.118.270.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>23.075.330.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 89.193.600.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp 0,00
b. Dana Darurat			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1). Semula	Rp	74.153.795.028,00	
2). Bertambah	Rp	<u>14.524.314.604,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 88.678.109.632,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1). Semula	Rp	357.078.145.562,00	
2). Bertambah	Rp	<u>36.187.793.438,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp 393.265.939.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :			
1). Semula	Rp	23.948.353.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>100.000.000,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp 24.048.353.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp 1.308.165.231.039,79

2). Bertambah Rp 42.388.425.404,41

Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 1.350.553.656.444,20

b. Belanja-Belanja Langsung

1). Semula Rp 582.773.755.661,60

2). Bertambah Rp 130.839.096.572,24

Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 713.612.852.233,84

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1). Semula Rp 1.096.736.183.408,69

2). Berkurang Rp (42.248.756.889,99)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 1.054.487.426.518,70

b. Belanja Bunga

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1). Semula Rp 34.620.400.000,00

2). Bertambah Rp 22.287.212.200,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 56.907.612.200,00

e. Belanja Bantuan Sosial				
1). Semula	Rp	9.963.070.000,00		
2). Berkurang	Rp	<u>(500.000.000,00)</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp	9.463.070.000,00
f. Belanja Bagi Hasil				
1). Semula	Rp	5.531.026.396,50		
2). Bertambah	Rp	<u>330.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	5.861.026.396,50
g. Belanja Bantuan Keuangan				
1). Semula	Rp	157.314.551.234,60		
2). Bertambah	Rp	<u>44.116.678.365,40</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp	201.431.229.600,00
h. Belanja Tidak Terduga				
1). Semula	Rp	4.000.000.000,00		
2). Bertambah	Rp	<u>18.403.291.729,00</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp	22.403.291.729,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja Pegawai				
1). Semula	Rp	63.449.711.957,70		
2). Bertambah	Rp	<u>3.530.299.133,45</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	66.980.011.091,15
b. Belanja-Belanja Barang dan Jasa				
1). Semula	Rp	233.165.667.158,90		
2). Bertambah	Rp	<u>45.876.381.119,79</u>		
Jumlah Belanja-Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp	279.042.048.278,69

c. Belanja Modal				
1). Semula	Rp	286.158.376.545,00		
2). Bertambah	Rp	<u>81.432.416.319,00</u>		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp	367.590.792.864,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 199.829.114.681,88

1). Semula	Rp	86.060.900.656,23		
2). Bertambah	Rp	<u>113.768.214.025,65</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp	199.829.114.681,88

b. Pengeluaran sejumlah Rp 0,00

1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 189.529.114.681,88

1). Semula	Rp	75.760.900.656,23		
2). Bertambah	Rp	<u>113.768.214.025,65</u>		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp	189.529.114.681,88

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 10.000.000.000,00

1). Semula	Rp	10.000.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	10.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00.

1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp	0,00
d. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 300.000.000,00				
1). Semula	Rp	300.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp	300.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00				
1). Semula	Rp	0,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan		<hr/>	Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal

BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo

Tahun 2015

Tanggal 7 Agustus 2015 Nomor

a.n. BUPATI PONOROGO

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

DR. Drs. AGUS PRAMONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700111 198903 1 002